

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Alatas, Syed Husein, 1983, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., et. Al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Ni'matul dan R Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia. Bandung,

Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Peraturan Kebijakan*, Varia Peradilan, Jakarta.

Manan, Bagir dan Kunta Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Marzuki, Laica, 2010, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Nasir, Ridwan, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Rinema Cipta, Jakarta.
- Purbopronoto, Koentjoro, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Siswanto, Heni, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi penelitian Hukum dan Juemetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indriyati, 2017, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sofyan, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Kencana, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal

Adi Mattalatta, “Politik Hukum Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6 Nomor 4, Desember, 2009.

Artidjo Alkostar, 2013, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime”, *Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, pada tanggal 18-21 November.

Berlian Simarmata, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan terorisme”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober, 2011.

Christianata, “Pengenyalpigan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya Terhadap Kasus Kerugian Uang Negara Dibawah Rp. 50.000.000,-“, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 2, Agustus, 2020.

Herikson Parulian Siahaan, Marlina dan Muaz Zul, “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Arbiter : Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Maryanto, “Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, Nomor 2, Juli, 2012.

Muhammad Shoim, 2009, “Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)”, *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*.

Titon Slamet Kurnia, “Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir”, *Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, April, 2015.

## C. Hasil Penelitian

Bambang Gunawan, 2020, “Analisis Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Kebijakan Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi pada Surat

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-944/PB/2019 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017)", *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kotamadya Pontianak, *Tesis*, (Bandung, Program Magister pada Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran, 1989).

Marcus Lukman, "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam bidang Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional", *Disertasi*, Universitas Padjajaran, 1996.

Maziyah Cahyaning Shiyam, 2020, "Kedudukan Surat Ketua Mahkamah Agung NO. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat Dalam Kaitannya Dengan Profesi Advokat", *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Murwiyanto, 2015, "Efektifitas Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

#### D. Internet

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-1.pdf>, diakses pada tanggal 12 September 2020

Arief, Barief, "Soal SE Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, Jaksa Agung: Itu Masih Diperdebatkan", <https://news.detik.com/berita/d-3152084/soal-se-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-jaksa-agung-itu-masih-diperdebatkan>, diakses 3 Desember 2020.

Asshiddiqie, Jimly, "Penegakan Hukum", [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

Bastary, M. Alvi Syahrin, "Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran", <https://www.pta.palembang.go.id/v2/index.php/berita/berita-pengadilan/artikel/956-mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

Eddgar, Joshua Ignatius, 2013, "Kebijakan Pemerintah", <https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

Kementerian Keuangan RI, “APBN Tahun 2020 Sebagai Instrumen Strategis dan Efektif Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/13336/siaran-pers-apbn-ta-2020.pdf>, diakses pada tanggal 12 September 2020.

Pengadilan Negeri Pati, “Kebijakan dan Peraturan Pengadilan”, <https://pn-pati.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/kebijakan-dan-peraturan-pengadilan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 12 September 2020.

Soebroto, Arif Christiono, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, <http://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/WORKSHOP Peraturan kebijakan di Kementerian PPN bappenas.pdf>, diakses pada tanggal 17 September 2020.

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Surat Edaran Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi